



Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir
Pusat Riset Kelautan
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019



*Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
Jl. Raya Padang-Painan KM.16 Bungus Padang Sumatera Barat*



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Keragaan SDM	5
1.4 Sistematika Laporan	8
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019	10
2.2 Sasaran Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2019	11
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2019	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2019	19
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
3.3.1 Customer Perspective	23
3.3.2 Internal Proses Perspective	25
3.3.3 Learn & Growth Perspective	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan	43
IV. PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Permasalahan	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Strategis LRSDKP 2019	13
Tabel 2.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP 2019	14
Tabel 3.	Penetapan Kinerja LRSDKP 2019.....	15
Tabel 4.	Capaian Capaian Kinerja pada masing-masing IKU TW I T.A 2019.....	18
Tabel 5.	Tingkat Validasi IKU	19
Tabel 6.	Nilai Indeks Capaian NPSS	19
Tabel 7.	Klasifikasi dan Status NPSS	20
Tabel 8.	Capaian kinerja LRSDKP pada customer Perspective TW I tahun 2019.....	23
Tabel 9.	Capaian IKU 1 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	24
Tabel 10.	Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	25
Tabel 11.	Capaian Kinerja LRSDKP TW I pada Perspektif internal Proses.....	25
Tabel 12.	Capaian IKU 3 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	27
Tabel 13.	Capaian IKU 4 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	28
Tabel 14.	Capaian IKU 5 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	29
Tabel 15.	Judul KTI LRSDKP yang telah terbit PADA Triwulan I tahun 2019	30
Tabel 16.	Capaian Kinerja LRSDKP pada perspective Learn and Growt TW I 2019.....	30
Tabel 17.	Capaian IKU 6 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	32
Tabel 18.	Capaian IKU 7 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	33
Tabel 19.	Capaian IKU 8 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	35
Tabel 20.	Capaian IKU 9 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	36
Tabel 21.	Capaian IKU 10 LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	42
Tabel 22.	Realisai anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2019.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	3
Gambar 2.	Sebaran Pegawai lingkup LRSDKP (PNS dan Tenaga Kontrak).....	6
Gambar 3.	Sebaran tingkat pendidikan PNS lingkup LRSDKP	6
Gambar 4.	Sebaran tingkat pendidikan Tenaga Kontrak lingkup LRSDKP.....	7
Gambar 5.	Sebaran Pegawai Lingkup LRSDKP berdasar jabatan fungsional	8
Gambar 6.	Peta Strategi LRSDKP 2019	12
Gambar 7.	Peta Strategi hasil Pencapaian Kinerja LRSDKP TW I T.A 2019.....	21
Gambar 8.	NPSS Hasil Pencapaian Kinerja LRSDKP TW I Tahun 2019	22
Gambar 9.	Komposisi Anggaran DIPA T.A 2019	43
Gambar 10.	Perbandingan target dan realisasi LRSDKP TW I Tahun 2019	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan sampai dengan akhir tahun 2019. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2019 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir menetapkan 6 Sasaran Strategis yang diuraikan menjadi 10 Indikator Kinerja Utama dalam 3 perspektif (*Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* serta *Learn and Growth Perspective*). Pengukuran capaian kinerja LRSDKP triwulan I tahun 2019 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*.

Hasil pengukuran capaian kinerja *Eksternal* LRSDKP yang menggunakan aplikasi **Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK)**, NPSS LRSDKP triwulan I tahun 2019 menggunakan metode pengukuran eksternal adalah sebesar 104,49% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :

- a. Perspektif Customer (Customer perspective) dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- b. Perspektif internal (Internal Process perspective) dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 100,00%;
- c. Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perspective) dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 108.96%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 104,49% dengan status baik (warna hijau) pada pengukuran menggunakan metode *Eksternal*.

Laporan Kinerja triwulan I tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban secara tertulis sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunianya-Nya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2019. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, April 2019
Kepala Loka,



[Handwritten signature]
Naelul Hasanah Ridwan, S.S
NIP. 19790401 200502 2 001

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai LRSDKP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja LRSDKP guna memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Triwulan I ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dasar pelaksanaan kegiatan LRSDKP tahun 2019, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, Indikator Kinerja Utama LRSDKP tahun 2019, Rencana Strategis (Renstra) LRSDKP 2017-2019, Rencana Kerja Tahunan (RKT) LRSDKP tahun 2019, Penetapan Kinerja (PK) Kepala LRSDKP, berbagai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) LRSDKP dan PPK lingkup LRSDKP.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), LRSDKP sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja mempunyai kewajiban untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; dan
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Pimpinan Unit Organisasi (Eselon I).

1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP. LRSDKP dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Struktur sebagai berikut :

a. Urusan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana.

b. Subseksi Tata Operasional

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.

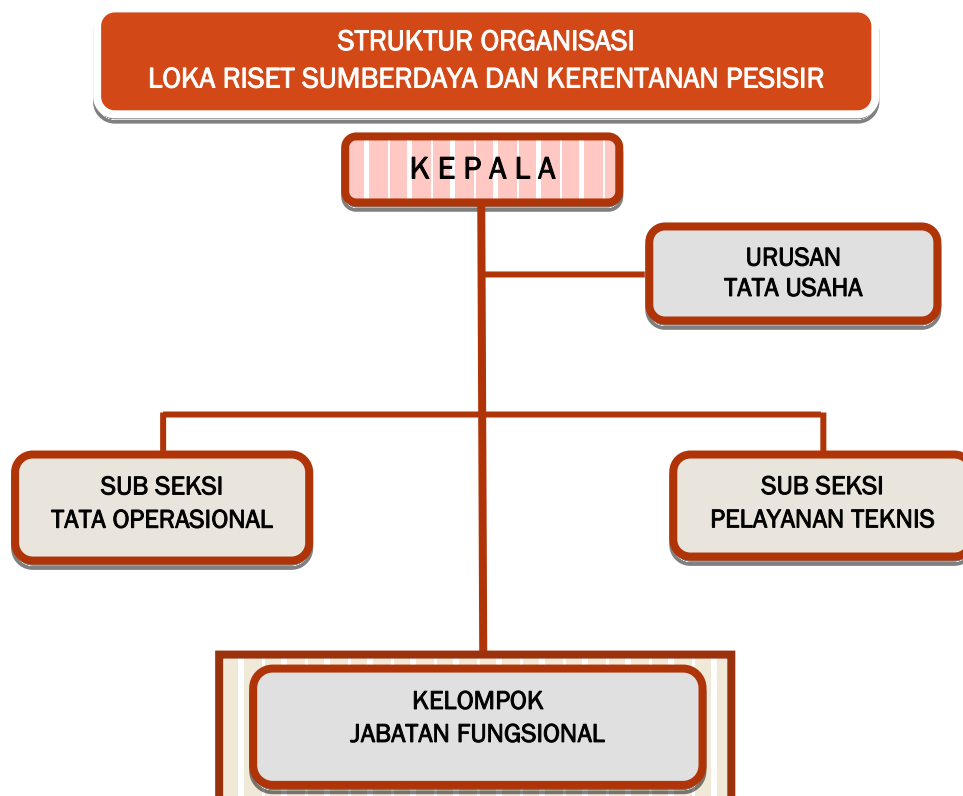
c. Subseksi Pelayanan Teknis

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi, kerja sama, pengelolaan prasarana dan sarana penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir, serta perpustakaan.

d. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagaimana struktur organisasi berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas *Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.*

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

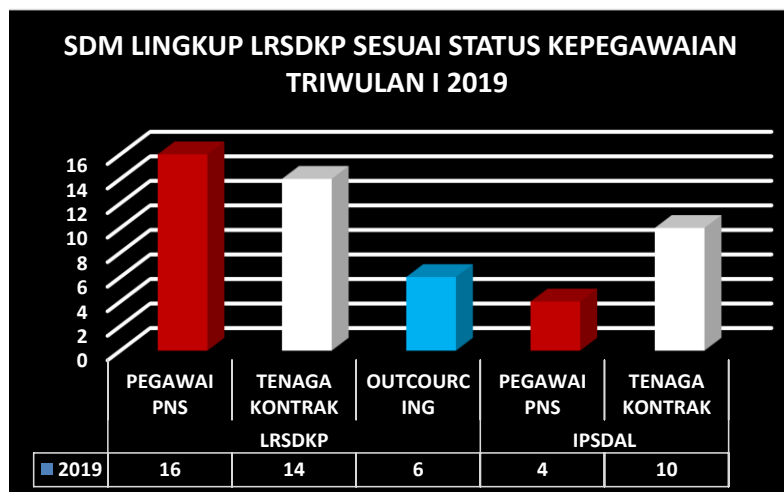
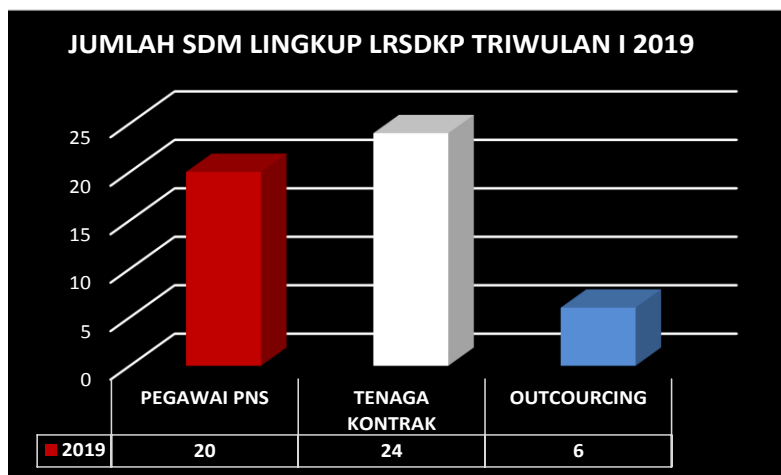
Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

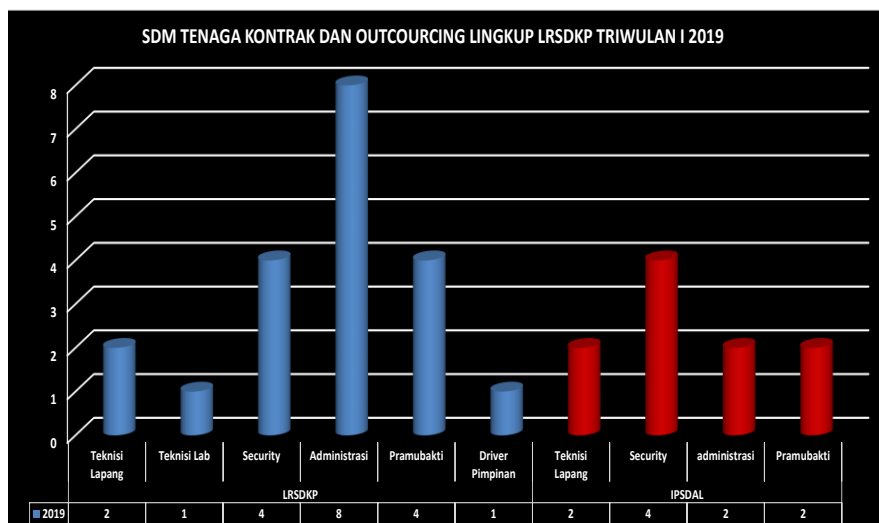
1. Menyelenggarakan penelitian penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
2. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
3. Menyelenggaraakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
4. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
5. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan

- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

1.3. KERAGAAN SDM LRSDKP

Pegawai Lingkup Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) pada Triwulan I tahun 2019 berjumlah 50 orang, 36 orang di kantor LRSDKP Bungus dan 14 Orang di kantor IPSDAL madura. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada Triwulan I tahun 2019.

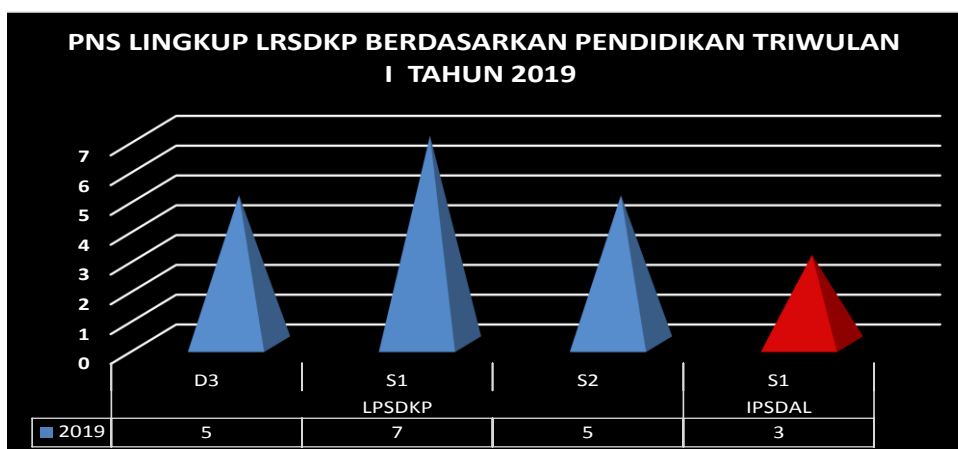




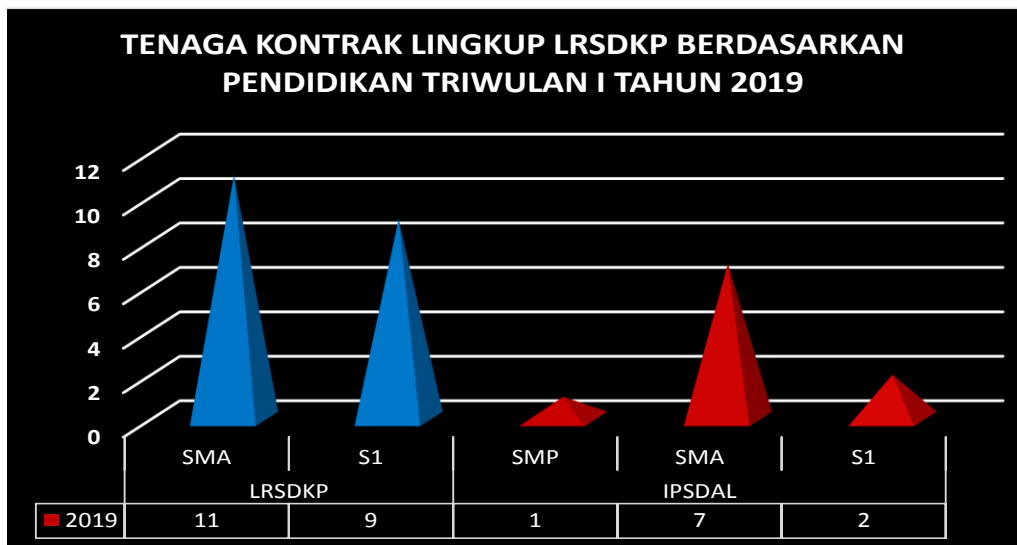
Gambar 2. Sebaran Pegawai LRSDKP (PNS dan Tenaga Kontrak) pada Triwulan I tahun 2019

Jumlah PNS lingkup LRSDKP pada Triwulan I tahun 2019 sebanyak 20 orang, mengalami perubahan jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2018, yakni ada penambahan 1 orang PNS yang masuk ke IPSAL madura sehingga jumlah PNS lingkup LRSDKP menjadi 20 orang. Sedangkan untuk tenaga kontrak berjumlah 30 orang (20 orang di kantor LRSDKP dan 10 orang di kantor IPSAL madura), mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni ada penambahan 6 orang dibagian scurity dan pramubakti di kantor LRSDKP yang berasal dari tenaga outsourcing.

Sementara untuk sebaran pegawai Lingkup LRSDKP pada triwulan I tahun 2019 menurut tingkat pendidikan tersaji sebagai berikut :



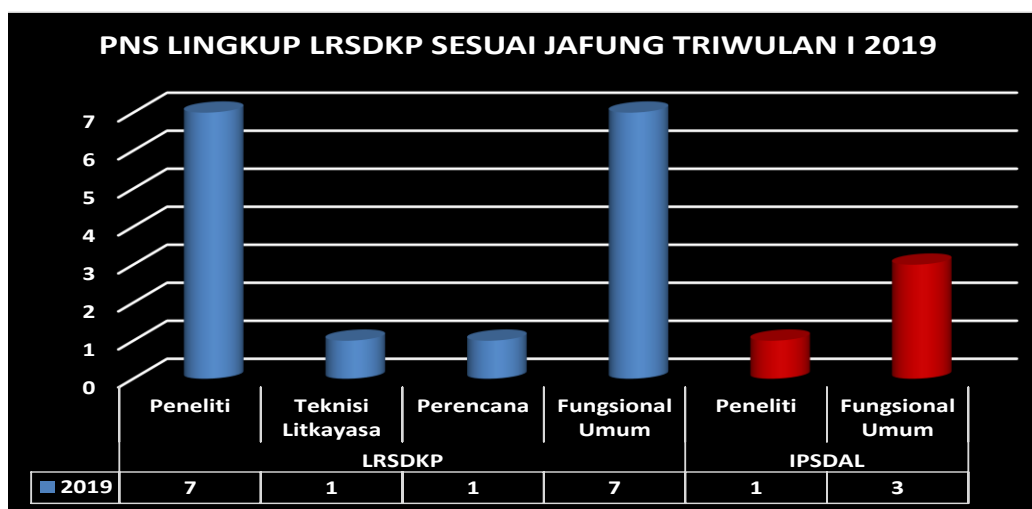
Gambar 3. Sebaran Tingkat pendidikan PNS lingkup LRSDKP pada triwulan I tahun 2019



Gambar 4. Sebaran Tingkat pendidikan pegawai kontrak lingkup LRSDKP pada triwulan I tahun 2019

Keragaan PNS Lingkup LRSDKP Triwulan I tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini dikarenakan adanya penambahan 1 orang PNS yang masuk ke kantor IPSAL madura sehingga jumlah pegawai dan keragaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan juga mengalami perubahan, perubahan tingkat pendidikan pegawai lingkup LRSDKP pada triwulan I tahun 2019 adalah pada tingkat pendidikan S2 mengalami penambahan 1 orang sehingga lulusan S2 menjadi 5 orang, dan dalam rangka peningkatan kapasitas serta kualitas sumberdaya manusia, 1 orang peneliti Loka riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir masih dalam pelaksanaan tugas belajar S2 di Institut Pertanian Bogor.

Sedangkan sebaran jabatan fungsional di lingkup LRSDKP sampai dengan Triwulan I tahun 2019 sebagai berikut :



Gambar 5. Sebaran Pegawai Lingkup LRSDKP berdasarkan jabatan fungsional pada Triwulan I tahun 2019

Keragaan Jabatan Fungsional PNS Lingkup LRSDKP Triwulan I tahun 2019 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni ada penambahan 1 orang peneliti yang masuk ke IPSAL madura, sehingga jumlah fungsioanal peneliti lingkup LRSDKP bertambah menjadi 8 orang, dan untuk fungsioanal yang lainnya tidak mengalami perubahan.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Dasar haluan yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja LRSDKP :

- Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja LRSDKP sampai dengan Triwulan I tahun 2019, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) terhadap rencana kinerja (performance plans) Triwulan I tahun 2019. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I tahun 2019
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan tentang Rencana Strategis LRSDKP 2018, dan Penetapan kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2019.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan I tahun 2019, serta membandingkannya dengan tahun lalu;
5. **Bab IV Penutup**, menyajikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2019; dan
6. **Lampiran-lampiran :**
 - a. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2019
 - b. Implementasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2019
 - c. Form Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2019 menggunakan metode Eksternal.

II. PERENCANAAN *dan* PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan serta ***mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan.***

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2017-2019.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2015-2019 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

A. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL).

Pusat Riset Kelautan menetapkan visi yaitu “Center of Excellence (Pusat Kepakaran) riset dan inovasi kelautan untuk mendukung visi misi BRSDM KP dan KKP” .

Berdasarkan visi Pusriskel tersebut, maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah “Institusi Penelitian yang Handal dalam Menghasilkan IPTEK Menuju Negara Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar”.

B. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mediseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

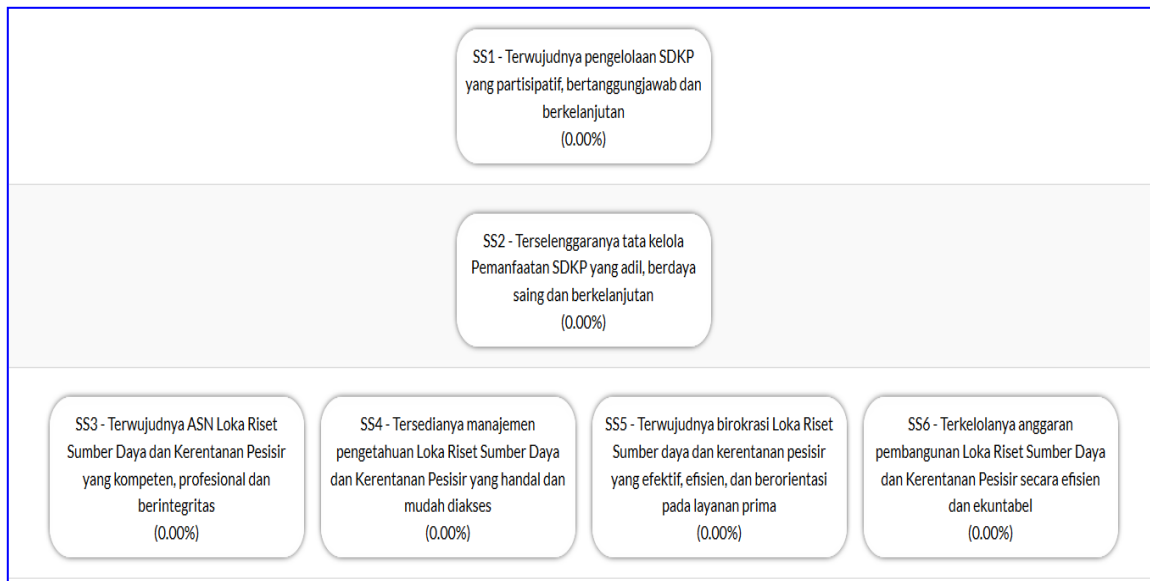
C. Tujuan

Tujuan LRSDKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
2. Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
4. Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

2.2. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2019

Peta strategi merupakan suatu *dashboard* (panel instrumen) yang memetakan Sasaran Strategis (SS) kedalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi LRSDKP. Peta strategi memudahkan LRSDKP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan LRSDKP. Peta strategi LRSDKP Triwulan I tahun 2019 yang disepakati antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel ditunjukkan dalam Gambar berikut :



Gambar 6. Peta Strategi LRSDKP tahun 2019

Peta strategi LRSDKP menampilkan setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balanced Scorecard* (BSC), setiap Sasaran Strategis (SS) berdasarkan tujuan yang akan dicapai dikelompokkan kedalam 2 (dua) perspektif, yaitu *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Internal Process Perspective* adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, dan *Learn and Growth Perspective* adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

Adapun penjabaran dari perspektif Peta Strategi LRSDKP dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sesuai Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Rencana Strategis LRSDKP tahun 2019

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	1	Nilai PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar)	0,00558
		2	Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi)	2
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	3	Jumlah Data, Informasi dan Rekomendasi hasil Riset Kelautan (paket)	3
		4	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)	2
		5	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) LRSDKP yang dipublikasikan (buah)	10
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya aparatur Sipil Negara LRSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	6	Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	60
4	Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses	7	Persentase unit kerja lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80
5	Terwujudnya birokrasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP	80
6	Terkelolanya anggaran pembangunan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir secara efisien dan ekuntabel	9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP %	87
		10	Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2018	1%

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu)

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Rencana kerja LRSDKP Triwulan I tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP Tahun 2019

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	1	Nilai PNBK Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar)	0,00558
		2	Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi)	2
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	3	Jumlah Data, Informasi dan Rekomendasi hasil Riset Kelautan (paket)	3
		4	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)	2
		5	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) LRSDKP yang dipublikasikan (buah)	10
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya aparatur Sipil Negara LRSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	6	Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	60
4	Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses	7	Persentase unit kerja lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80
5	Terwujudnya birokrasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP	80
6	Terkelolanya anggaran pembangunan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir secara efisien dan ekuntabel	9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP %	87
		10	Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2018	1%

2.3. PENETAPAN KINERJA 2018

LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, sasaran strategis tahunan pada penetapan kinerja tahun 2019 dibagi dalam Tiga perspektif yaitu : 1) *Customer Perspective* : lebih berorientasi pada apa yang harus dilakukan terhadap KKP dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, 2). *Internal Process Perspective* : adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, dan 3) *Learning and Growth Perspective* : adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 6 (enam) sasaran strategis (SS) yang harus dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU LRSDKP tahun 2019 untuk semua SS berjumlah 10 IKU. Penetapan Kinerja LRSDKP tahun 2019 tersaji pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Penetapan Kinerja LRSDKP Tahun 2019

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	1	Nilai PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar)	0,00558
		2	Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi)	2
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	3	Jumlah Data, Informasi dan Rekomendasi hasil Riset Kelautan (paket)	3
		4	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)	2
		5	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) LRSDKP yang dipublikasikan (buah)	10

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya aparatur Sipil Negara LRSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	6	Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	60
4	Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses	7	Persentase unit kerja lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80
5	Terwujudnya birokrasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP	80
6	Terkelolanya anggaran pembangunan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir secara efisien dan ekuntabel	9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP %	87
		10	Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2018	1%

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kerja LRSDKP tahun 2019 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel. Perjanjian kerja ini memuat sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target. IKU tersebut merupakan salah satu dukungan program penelitian dan pengembangan lptek kelautan dan perikanan tahun 2019. Pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai IKU-IKU tersebut LRSDKP menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 6.195.091.000,- yang bersumber dari APBN.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penerapan metode Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja LRSDKP telah lama dilakukan, meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya mengakomodir prinsip – prinsip BSC, namun hal tersebut tetap dilanjutkan dalam rangka memastikan target – target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pencapaian Visi dan Misi LRSDKP dilakukan melalui penetapan 6 Sasaran Strategis (SS) yang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja LRSDKP tahun 2019. Dengan menerapkan metode BSC sebagai alat manajemen kinerja, maka nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS), nilai pencapaian inisiatif strategis (NPIS) dan nilai kinerja keseluruhan (NKK) Tapja APBN tahun 2019 dari 6 Sasaran Strategis (SS) dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat lebih akuntabel.

3.1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2019 dapat tercapai.

Capaian Kinerja Utama (IKU) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan I tahun 2019 pada *Customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective* mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Capaian indikator kinerja utama pada masing – masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan I tahun 2019 adalah sebagai berikut (Tabel 5) :

Tabel 4. Capaian Kinerja pada masing-masing IKU Triwulan I tahun 2019

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Triwulan I tahun 2019			
			T	R	%	
CUSTOMER PERSPECTIVE						
1	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	1	Nilai PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar)	-	-	-
		2	Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi)	-	-	-
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	3	Jumlah Data, Informasi dan Rekomendasi hasil Riset Kelautan (paket)	-	-	-
		4	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)	-	-	-
		5	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) LRSDKP yang dipublikasikan (buah)	2	2	100
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE						
3	Terwujudnya aparatur Sipil Negara LRSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	6	Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	-	-	-
4	Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses	7	Persentase unit kerja lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50	60	120
5	Terwujudnya birokrasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP	15	15	100
6	Terkelolanya anggaran pembangunan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir secara efisien dan ekuntabel	9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP %	60	68,3	113
		10	Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2018	0,01	0,01	100

Berdasarkan data pada Tabel 5 terdapat 3 IKU yang nilai capaiannya sama dengan target yakni IKU 5, IKU 8, IKU 10. Sedangkan 2 IKU nilai capaiannya melebihi target yakni IKU 7, dan IKU 9,. Sedangkan untuk 5 IKU tidak ada target dan juga realisasi pada triwulan I karena pencapaian IKU ini diakhir tahun yakni IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4 dan IKU 6.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis. Pengukuran capaian kinerja mengacu pada teknik pengukuran berdasarkan Balance Score card yaitu Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS);

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 10%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Tingkat Validasi IKU

No	Validasi IKU	Bobot
1	Lead Input	0,1
2	Lead Proses	0,2
3	Lag Output	0,3
4	Lag Outcome	0,4

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut (Tabel 6) :

Tabel 6. Nilai Indeks Capaian NPSS

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian \geq 100 %	100% > Indeks Capaian \geq 90%	Indeks Capaian < 90 %

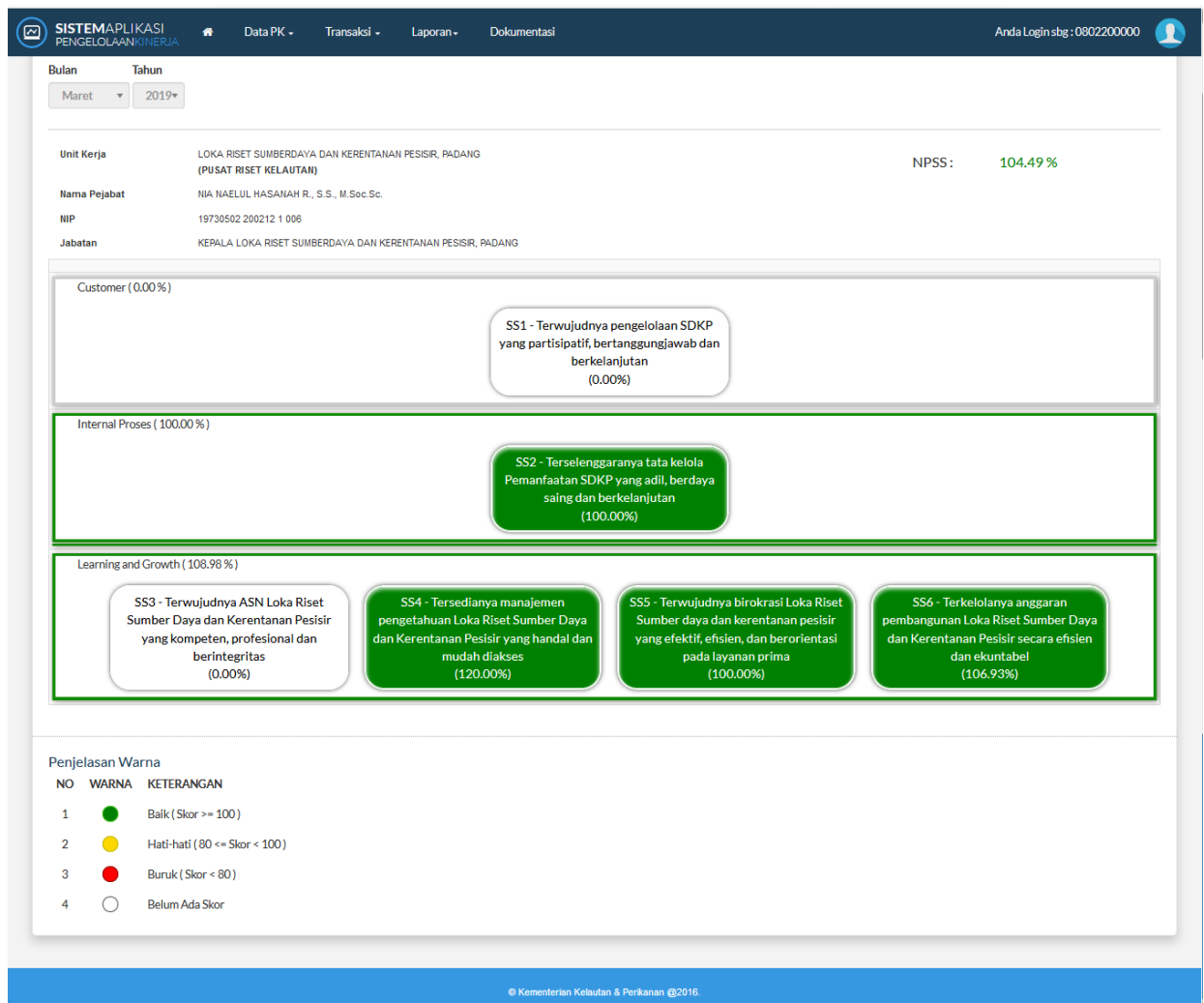
Dalam melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut (Tabel 7).

Tabel 7. Klasifikasi dan Status NPSS

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 10%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 90\%$	$X > 90\%$	$X < 90\%$ atau $X < 90\%$	Buruk
$100\% > X \geq 90\%$	$100\% < X \leq 90\%$	-	Sedang
$X \geq 100\%$	$X \leq 100\%$	$X = 100\%$	Baik

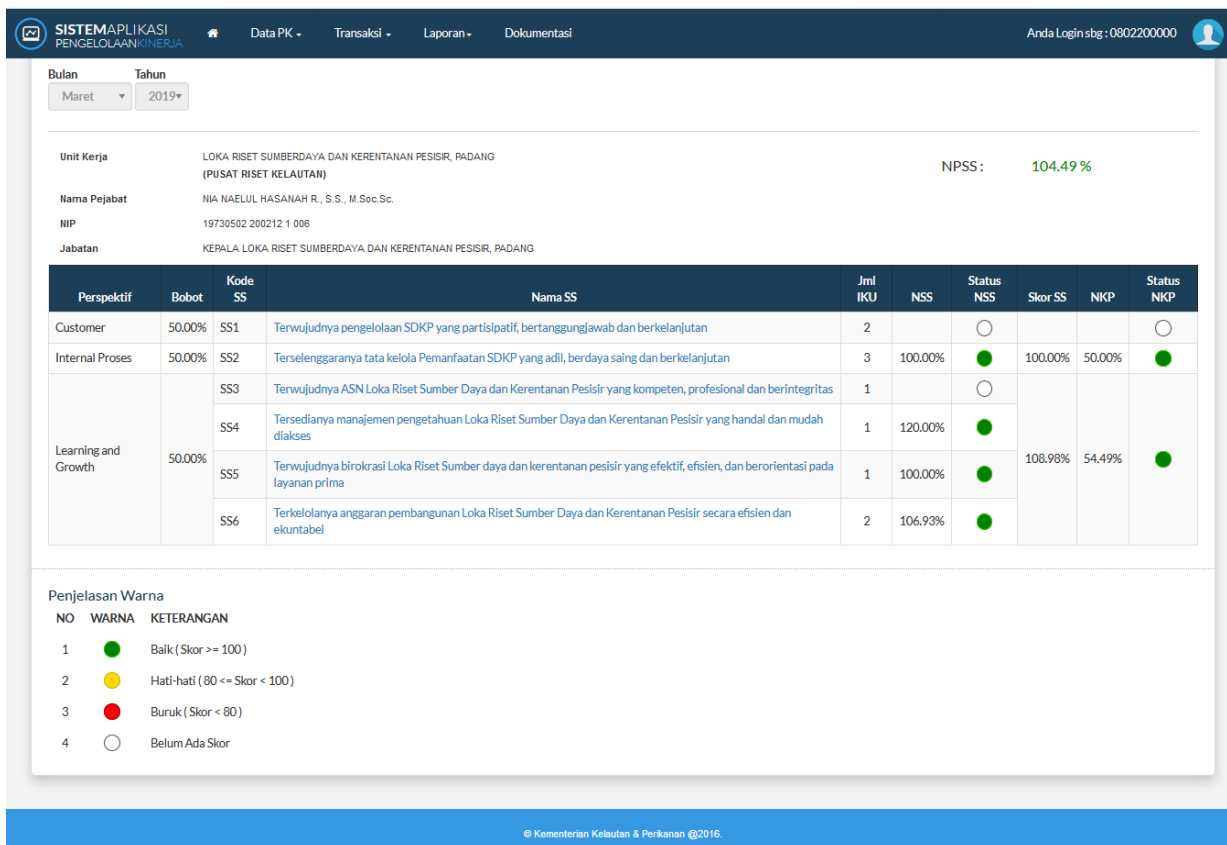
Dalam melakukan pengukuran kinerja juga harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : *Maximize* adalah kondisi dimana semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah kondisi dimana semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah kondisi dimana semakin stabil (tidak naik dan turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP pada Triwulan I tahun 2019 menggunakan metode/tools pengukuran yang menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. berikut nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Triwulan I tahun 2019 menggunakan aplikasi kinerjaku terdapat pada (Gambar 8),



Gambar 7. Peta strategis hasil Pencapaian Kinerja LRSDKP dalam Aplikasi Kinerja Triwulan I tahun 2019.

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Loka Riset Sumberdaya dan kerentanan pesisir yang menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Triwulan I tahun 2019 (gambar 6) terlihat bahwa 4 sasaran strategis berwarna hijau yang menunjukkan bahwa realisasi telah mencapai atau melebihi target ($\geq 100\%$)



Gambar 8. NPSS Hasil Pencapaian Kinerja LRSDKP dalam Aplikasi Kinerja Triwulan I tahun 2019.

NPSS LRSDKP Triwulan I tahun 2019 (Gambar 9) menggunakan metode pengukuran eksternal adalah sebesar 104,49% berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :

- Perspektif Customer (Customer perspective) dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Perspektif internal (Internal Process perspective) dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 100,00%;
- Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perspective) dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 108.96%.

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

3.3.1. CUSTOMER PERSPECTIVE

Tabel 8. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2019 pada Level Customer Perspective

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Triwulan I tahun 2019			
			T	R	%	
CUSTOMER PERSPECTIVE						
1	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	1	Nilai PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar)	-	-	-
		2	Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi)	-	-	-

Capaian kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Perspective Customer dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 0,00%; yang dikontribusi dari 1 (satu) sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Nilai capaian sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan sebesar 0,00%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Nilai PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar)

IKU ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan nilai PNBP dari hasil penyelenggaraan layanan jasa riset dan SDM yang diambil dari aplikasi SIMPONI dengan tujuan untuk menggambarkan kontribusi Loka Riset sumberdaya dan kerentanan Pesisir dalam mendukung pendapatan negara melalui hasil penyelenggaraan layanan jasa riset dan SDM KP. Target jumlah nilai PNBP yang ditargetkan Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir adalah sebesar Rp.

0,00558 Milyar dalam 1 tahun anggaran, Dengan rincian waktu pencapaian adalah 12 bulan selama tahun 2019.

Tabel 9. Capaian IKU 1 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Nilai PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar)</i>		
- Target	Tidak ada IKU ini	-
- Realisasi	Tidak ada IKU ini	-
- Persentase (%)	Tidak ada IKU ini	-

Pada Triwulan I tahun 2019, capaian IKU 1 adalah sebesar Rp. 0,- karena sampai dengan akhir triwulan I memang belum ada yang menggunakan jasa PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Nilai Capaian IKU 1 pada Triwulan I tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun 2018 karena IKU Nilai PNBP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Rp. Miliar) ini tidak ada pada Kinerja tahun 2018.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi)

IKU ini didefinisikan sebagai Hasil riset KP (berupa rekomendasi) yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada stakeholder (MKP, Eselon I dan Eselon II KKP, Pemda, K/L lain) melalui dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas), Hasil dapat berasal dari kegiatan riset 2015 – 2019 yang diusulkan sebagai bahan kebijakan tahun 2019.

IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi loka riset sumber daya dan kerentanan pesisir dalam memberiksn masukan/rumusan kebijakan berbasis ilmiah untuk pengelolaan sumberdaya kelautan yang lestari dan berkelanjutan

Bukti capaian Akhir dari IKU ini adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi dan masukan kebijakan : bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief, bahan kebijakan yang telah dirumuskan (peraturan, buku pedoman, keputusan, dll),

- Dokumen disampaikan melalui penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas) kepada stakeholder (MKP, Eselon I dan Eselon II KKP, Pemda, K/L lain) dari Kepala BRSDM

Tabel 10. Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi)</i>		
- Target	Tidak ada IKU ini	-
- Realisasi	Tidak ada IKU ini	-
- Persentase (%)	Tidak ada IKU ini	-

Capaian IKU 2 Triwulan I tahun 2019 adalah 0 atau belum tercapai karena IKU ini ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2019 mengingat kegiatan Riset yang dilaksanakan Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir baru selesai pada akhir tahun anggaran. Keberhasilan pencapaian IKU sangat erat kaitannya dengan proses kegiatan Riset yang dilaksanakan oleh Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir.

Nilai Capaian IKU 2 pada Triwulan I tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun 2018 karena IKU Jumlah Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang diusulkan sebagai bahan kebijakan (rekomendasi) ini tidak ada pada Kinerja tahun 2018.

3.3.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Tabel 11. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2019, Perspective Internal Proses

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Triwulan I tahun 2019			
			T	R	%	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	3	Jumlah Data, Informasi dan Rekomendasi hasil Riset Kelautan (paket)			
		4	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)			

		5	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) LRSDKP yang dipublikasikan (buah)	2	2	100
--	--	---	---	---	---	-----

Capaian kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Perspective learn and growth perspective dengan bobot 50.00%, capaian kinerja sebesar 100,00%; yang dikontribusi dari 1 (satu) sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS 2

Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

Nilai capaian sasaran strategis Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan sebesar 100,00%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

Jumlah Data, Informasi dan Rekomendasi hasil Riset Kelautan (paket)

IKU ini didefinisikan sebagai Data dan Informasi Sumberdaya Pesisir yang dihasilkan dari kegiatan penelitian "*Kajian Kerentanan Pesisir Akibat Bencana Sampah di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Identifikasi Kerentanan dan Inventarisasi Sumber Daya Pesisir di Pesisir Barat Pulau Sumatera (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Analisis Potensi Sumber Daya Situs Kapal Tenggelam di "Jalur Rempah", Ternate-Tidore*" yang dilaksanakan pada tahun 2019, Target jumlah Informasi dan atau rekomendasi kebijakan KP yang ditetapkan adalah 3 (paket/buah) dalam 1 tahun anggaran, Dengan rincian waktu pencapaian adalah 11 bulan pencapaian lapangan dan 1 bulan terakhir untuk pelaporan.

Bukti Capaian pada IKU ini adalah sebagai berikut :

Resume/naskah dari kegiatan riset data informasi dan rekomendasi

Kegiatan riset data informasi berupa peta/ gambar, infografis, tabel terkait :

- Data kelautan; data potensi/ produksi/ luasan budi daya/ parameter lingkungan dan kewilayahan

- b. Informasi kelautan; peta fishing ground/ distribusi perikanan/ daya dukung perairan/ daya dukung lahan budi daya/ kerentanan pesisir/
- c. Rekomendasi : kebijakan pengelolaan SDKP

Tabel 12. Capaian IKU 3 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Jumlah Data dan Informasi Hasil Riset Kelautan (paket/buah)</i>		
- Target	3	-
- Realisasi	3	-
- Persentase (%)	100%	-

IKU 3 Pada Triwulan I tahun 2019, belum tercapai karena kegiatan riset ditargetkan selesai pada akhir tahun yakni bulan November – desember 2019.

Capaian IKU 3 pada triwulan I tahun 2019 belum bisa dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2018 karena IKU ini ditargetkan baru tercapai pada akhir tahun. Keberhasilan capaian tahun 2018 disebabkan oleh keberhasilan setiap kegiatan penelitian dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU, dan juga tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan selama tahun pelaksanaan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama litbang di bidang Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen) selama tahun berjalan.

DEFINISI

1. Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm kelautan dan perikanan
2. Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusat Riset Kelautan

3. Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama (sedang berjalan/on going).
4. Kerja sama riset Kelautan adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:
 - a. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
 - c. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian;
 - d. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;
 - e. Diseminasi dan publikasi; Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama;
 - f. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM

Target yang dicanangkan pada tahun 2019 untuk pencapaian IKU ini adalah 2 (dua) buah usulan jejaring dan kerjasama litbang di bidang Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir. Kerjasama ini tidak mempunyai anggaran tersendiri, jadi perkembangannya tidak bisa diukur dari realisasi keuangan.

Tabel 13. Capaian IKU 4 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)</i>		
- Target	1	-
- Realisasi	2	-
- Persentase (%)	200%	-

Pada Triwulan I tahun 2019 direncanakan 1 usulan kerjasama, yaitu Usulan kerjasama LRSDKP dengan Center for underwater archaeology Shandong, china Jejaring. Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2019 usulan kerjasama tersebut belum terbentuk.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018, persentase capaian terhadap target IKU 4 Triwulan I tahun 2019 lebih rendah karena usulan kerjasama pada tahun 2019 ini belum terbentuk.

Nilai Capaian IKU 4 pada Triwulan I tahun 2019 ini belum bisa dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun 2018 karena IKU Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen) ditargetkan baru terealisasi diakhir tahun 2019.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan (buah)

IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan di jurnal terakreditasi atau prosiding dalam dan/atau luar negeri pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti di LRSDKP. Pada tahun 2019, target karya tulis ilmiah yang ditetapkan adalah 10 buah.

Tabel 14. Capaian IKU 5 LRSDKP Triwulan I tahun 2019






Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan (buah)</i>		
- Target	8	2
- Realisasi	23	2
- Persentase (%)	287,5	100

Dari Tabel 12 terlihat bahwa hingga akhir Triwulan I tahun 2019, capaian KTI LRSDKP sebanyak 2 buah KTI yang telah terbit, jadi untuk target KTI Triwulan I tahun 2019 telah **tercapai**.

Nilai Capaian IKU 5 pada Triwulan I tahun 2019 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian Kinerja pada IKU yang sama di tahun 2018.

Daftar KTI LRSDKP yang telah terbit sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2019 terdapat pada table 13 sebagai berikut

Tabel 15. Judul KTI LRSDKP yang telah terbit Triwulan I tahun 2019

No	Penulis	Judul	Penerbit	Kategori
1	Wisnu Arya Gemilang, Ulung Jantama Wisna, Gunardi Kusumah	Identifikasi Kontaminasi Air Tanah Oleh Polutan Cl- di Kawasan Pertanian Garam, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis	Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 20 No. 1 (2019) 	Jurnal Nasional 
2	Ulung Jantama Wisna, Guntur Adhi Rahmawan, Koko Ondara, Wisnu Arya Gemilang, Ruzana Dhiauddin, Nia Naelul Hasanah Ridwan, dan Ilham	Offshore Floating Marine Fish Cage Aquaculture Development Planning Evaluation Based on Hydro-Oceanography Conditions in Sabang Bay, Weh Island	Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis Vol. 11 No. 1 (2019) 	Jurnal Nasional  

3.3.3 LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Tabel 16. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2019, Perspective Learn and Growth

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Triwulan I tahun 2019			
			T	R	%	
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE						
3	Terwujudnya aparatur Sipil Negara LRSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	6	Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)			
4	Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses	7	Persentase unit kerja lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50	60	120
5	Terwujudnya birokrasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP	15	15	100
6	Terkelolanya anggaran pembangunan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir secara efisien dan ekuntabel	9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP %	60	68,3	113
		10	Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2018	0,01	0,01	100

Capaian LRSDKP pada perspektif pelanggan (*learn and growth perspective*) dengan bobot perspektif sebesar 50% sebesar 108.96%. yang berasal dari 4 (empat) sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya ASN LRSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Nilai sasaran strategis terwujudnya Terwujudnya ASN LRSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian sebesar 00% (penghitungan akhir tahun). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma..

DEFINISI

- Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari ASN
- Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

FORMULASI

1. Kualifikasi (Bobot 25%)
2. Kompetensi (Bobot 40%)
3. Kinerja (Bobot 30%)
4. Disiplin (Bobot 5%)

$$\text{Nilai IPA LRSDKP} = \frac{\sum \text{Nilai IPA Pegawai LRSDKP}}{\sum \text{pegawai LRSDKP}}$$

Tabel 11. Capaian IKU 6 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)</i>		
- Target	90	-
- Realisasi	99.02	-
- Persentase (%)	110.02	-

Capaian IKU indeks kompetensi dan integritas LRSDKP pada Triwulan I tahun 2019 adalah sebesar 0%,

Nilai capaian IKU 6 pada Triwulan I tahun 2019 belum bisa dibandingkan dengan persentase capaian IKU tahun 2018, karena untuk IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks) baru dilakukan penghitungan pada akhir tahun anggaran.

SASARAN STRATEGIS 4

Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses

Nilai sasaran strategis Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses sebesar 120.00%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

Prosentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari, dimana menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Komponen penilaian implementasi manajemen pengetahuan terdiri dari 3 Variabel, yaitu:

1. Sharing dokumen, (bobot 20%)
2. Keikutsertaan Pejabat administratif s.d staf unit kerja (bobot 40%),
3. Keaktifan Pejabat administratif unit kerja (bobot 40%).

FORMULA

$$\% \text{ MP} = (20\% \times \text{Upload dokumen}) + (40\% \times \text{Keikutsertaan}) + (40\% \times \text{Keaktifan})$$

Keterangan:

- Tingkat sharing dokumen : Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB
- Tingkat keikutsertaan : Persentase pejabat administratif dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP dibanding total Pejabat administratif s.d Staff unit kerja.
- Tingkat keaktifan : Persentase pejabat administratif yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total pejabat administratif unit kerja.

Pada Triwulan I tahun 2019, nilai capaian IKU 7 adalah sebesar 60%. Yang berasal dari komponen :

1. Sharing dokumen,
2. Keikutsertaan Pejabat administratif s.d staf unit kerja, nilai 40% didapatkan dari jumlah pejabat LRSDKP (Kepala Loka, Kasubsie TO, Kasumsie PT, Kaur Tata Usaha dan 2 Staff) yang ikut mendaftar dalam aplikasi Bitrix 24 Kinerja KKP
3. Keaktifan Pejabat administratif unit kerja, nilai 20% (keaktifan 3 orang dalam menyampaikan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh LRSDKP

Tabel 18. Capaian IKU 7 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Prosentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sintem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)</i>		
- Target	65	50
- Realisasi	86,66	60
- Persentase (%)	133.3%	120

Persentase capaian IKU 7 pada Triwulan I tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 turun dari 133.3% menjadi 120,00%. Penurunan persentase capaian IKU disebabkan oleh beberapa dokumen yang memang belum ada seperti LKJ Triwulan II, III, dan IV.

SASARAN STRATEGIS 5

Terwujudnya birokrasi LRSDKP yang efektif, efisien dan beorientasi pada layanan prima

Nilai Terwujudnya Terwujudnya birokrasi LRSDKP yang efektif, efisien dan beorientasi pada layanan prima ini sebesar 120,00%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP

IKU ini didefinisikan sebagai Dasar peraturan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Pasal 25 tentang tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2019 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BRSDM yang menjadi objek pengawasan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 80% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan selama periode pengukuran

Tabel 19. Capaian IKU 8 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP</i>		
- Target	Tidak ada IKU ini	15
- Realisasi	Tidak ada IKU ini	15
- Persentase (%)	Tidak ada IKU ini	100

Pada Tabel 18 ditunjukkan bahwa capaian nilai IKU 8 pada Triwulan I tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Nilai Capaian IKU 8 pada Triwulan I tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun 2018 karena IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP ini tidak ada pada Kinerja tahun 2018.

SASARAN STRATEGIS 6

Terkelolanya anggaran pembangunan LRSDKP secara efisien dan akuntabel

Nilai sasaran strategis Terkelolanya anggaran pembangunan LRSDKP secara efisien dan akuntabel sebesar 106.5%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (Dua) IKU sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP

IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran dan bertujuan untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya, atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sesuai yang ditargetkan. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus

Table 20. Capaian IKU 9 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (%)</i>		
- Target	BB (86)	60
- Realisasi	93.83	63.3
- Persentase (%)	109.10%	113%

FORMULASI

1. Revisi DIPA

- Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung rasio jumlah pengajuan revisi terhadap jumlah DIPA yang dikelola
- Jenis revisi yang mejadi objek penilaian kinerja adalah revisi DIPA pagu tetap, tidak termasuk revisi karena kesalahan administrasi
- Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut

$$\left(\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA)

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, dengan mengukur rasio tingkat deviasi antara realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA

- b. Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L

$$\text{Rata-rata } \left| \frac{((\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA}))}{(\text{Perencanaan Hal III DIPA})} \right|$$

3. Pengelolaan UP

- a. Indikator pengelolaan UP digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Uang Persediaan terkait ketepatan waktu pertanggungjawabannya. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan SPM GUP/PTUP tepat waktu dibandingkan dengan total SPM GUP/PTUP
- b. Pengajuan SPM GUP/PTUP dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan (30 hari kalender). Pengajuan SPM GUP sekurang-kurangnya telah digunakan sebanyak 50% dari besaran UP yang dimintakan
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP

$$\left(\frac{(\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu})}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

4. Rekon LPJ Bendahara

- a. Indikator LPJ Bendahara digunakan untuk menilai kinerja Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan LPJ tepat waktu dibandingkan dengan total LPJ yang disampaikan ke KPPN
- b. Pengajuan LPJ Bendahara dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal s.d. tanggal 10 awal bulan berikutnya.
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara

$$\left(\frac{(\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu})}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

5. Data Kontrak

- a. Indikator penyampaian data kontrak digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan data kontrak khususnya terkait penyampaian ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu dibandingkan dengan total data kontrak yang diajukan ke KPPN
- b. Penyampaian data kontrak dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak

$$\left(\frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator penyelesaian tagihan digunakan untuk menilai kinerja jabatan pengelola keuangan dengan mengadministrasikan tagihan kontraktual yang telah jatuh tempo hingga diajukan SPM tepat waktu dibandingkan dengan total SPM yang diajukan ke KPPN.
- b. SPM penyelesaian tagihan dapat dikategorikan tepat waktu apabila SPM LS (Non Belanja pegawai) disampaikan ke KPPN maksimal 17 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
- c. Semakin tinggi % ketetapan waktu maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihan

$$\left(\frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

7. Penyerapan anggaran

- a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah.

- b. Target penyerapan tahun 2017, yakni TW 1: 15% TW 2: 40% TW 3: 60% TW 4: 90%
- c. Kinerja penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik.

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

8. Return SP2D

- a. Indikator return SP2D digunakan untuk menilai kualitas SPM yang diajukan khususnya berkaitan dengan ketepatan data suplier pada SPM. Penilaian kinerja dihitung dengan mengukur rasio jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan.
- b. Hal-hal yang sering menyebabkan retur SP2D antara lain kesalahan rekening, kesalahan nama penerima, nomor rekening tidak aktif, dll
- c. Semakin rendah prosentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN.

$$\left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$$

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator renkas/RPD harian digunakan untuk menilai kinerja manajemen pembayaran K/L khusus pada SPM yang wajib disampaikan Renkas/RPD sebelum pengajuan SPM. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pengajuan SPM dibandingkan renkas/SPD yang diajukan.
- b. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian.

$$\left(\frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

10. Pengembalian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

11. Dispensasi Penyampaian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

12. Pagu Minus

- a. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait Belanja Pegawai, dengan mengukur rasio pagu minus Belanja Pegawai terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L
- b. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur kinerja secara tahunan.

- c. Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut

$$\left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

IKU ini bertujuan Untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran Pusat Riset Kelautan dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi Pusat Riset Kelautan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada aplikasi online omspan Kementerian Keuangan (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). Nilai kinerja tersebut berubah secara real time selaras dengan realisasi keuangan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai output yang diisikan pada aplikasi om span tersebut. Capaian IKU 9 pada Triwulan I tahun 2019 sebesar 68,3 dari target nilai kinerja anggaran sebesar 60. Nilai ini termasuk dalam kategori **Baik** (status warna hijau).

Dibandingkan dengan capaian tahun 2018, prosentae nilai kinerja anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2019 relatif lebih tinggi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10

Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2018

Nilai temuan atas lapoaran keuangan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Setjen merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk IKU "Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Satker dibandingkan realisasi anggaran satker tahun 2018" menggunakan metode

cascading dipersempit dengan target 1%, namun Satker tidak melakukan penilaian mandiri, melainkan dari hasil evaluasi penilaian dari Itjen dan Biro Keuangan yang akan diketahui pada akhir tahun berdasarkan hasil tindak lanjut Satker terhadap LHP BPK

FORMULASI

$$\text{Batas Tertinggi Persentase} = \frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2018}}{\text{Realisasi Riil TA 2018}} \times 100\%$$

Keterangan :

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2018 (audited) tidak melebihi 1 %

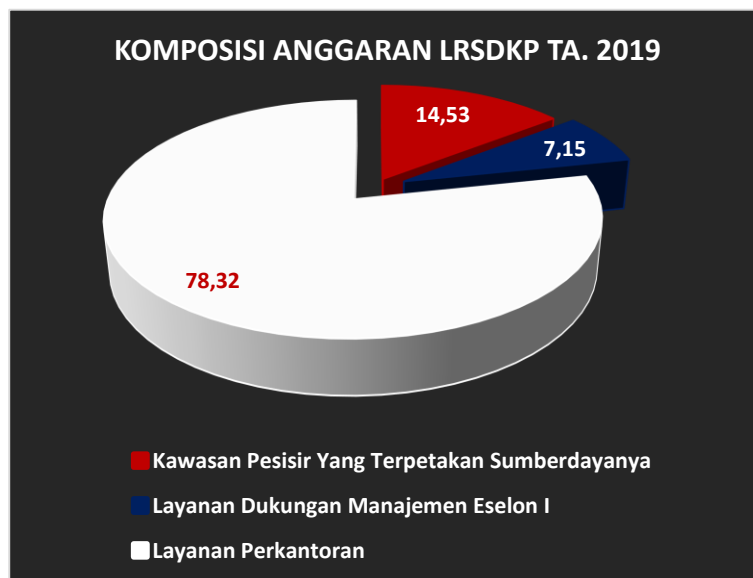
Tabel 21. Capaian IKU 10 LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2018	Triwulan I tahun 2019
<i>Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2018</i>		
- Target	1%	0,01
- Realisasi	1%	0,01
- Persentase (%)	100%	100%

Capaian IKU 10 pada Triwulan I tahun 2019 ini prosentase nya sama 100% bila dibandingkan dengan penilaian kinerja tahun 2018. Dan untuk IKU 10 ini yang melakukan penilaian dari Itjen bukan dari penilaian mandiri satker.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2019 untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan, LRSDKP menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 6.195.091.000,- yang terbagi kedalam 3 (Tiga) jenis keluaran (output), yakni Kegiatan Kawasan Pesisir Yang Terpetakan Sumberdayanya Rp. 900.000.000,-, Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Rp 443.000.000,-, Layanan Perkantoran Rp 4.852.091.000,-, adapun proporsi anggarannya seperti pada gambar 5.

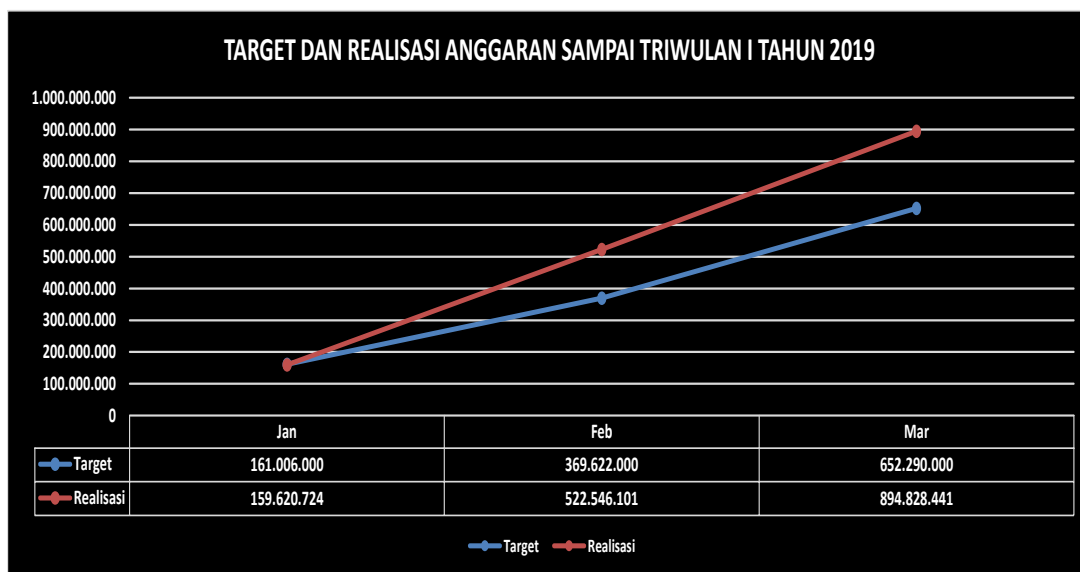


Gambar 9. Komposisi Anggaran DIPA T.A 2019

Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2019 terdapat pada Tabel 22 berikut:

Tabel 22. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2019

No	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%	Keterangan
1	6.195.091.000,-	894.828.441,-	14,4	5.300.262.559,-	85,5	



Gambar 10. Perbandingan target dan realisasi keuangan LRSDKP Triwulan I tahun 2019

Dari pagu anggaran Triwulan I tahun 2019, telah terealisasi sebesar Rp. 894.828.441,- (14,4%) dari target sebesar Rp. 652.290.000,- (10,53%), terdapat selisih realisasi dengan target lebih besar realisasi daripada target.

IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa dengan metode pengukuran *Eksternal* menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di website kinerjaku.kkp.go.id, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berhasil mencapai target kinerja Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 104,49 % dengan status baik. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektive yang ditetapkan (**customer 0,00%**, **Internal Proses 100,00%** dan **Learning and Growth 108,98%**).

4.2 PERMASALAHAN